



[Halaman Awal](#) |
 [Tentang Perwakilan](#) |
 [Hasil Pemeriksaan](#) |
 [UJDIH](#) |
 [Publikasi](#) |
 [Pranala](#) |
 Jum'at, 1 September 2017

» [Berita Utama](#) > [Siaran Pers](#)

PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2016 PEMERINTAH PROVINSI RIAU

31/05/2017 – 13:57



Pekanbaru – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau.

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016 dilakukan langsung oleh Anggota VII BPK RI, **Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.** bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu:



- Masih terdapat penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau;
- Pengelolaan transaksi akhir tahun pada Pemerintah Provinsi Riau belum tertib; dan
- Pengendalian atas pengadaan barang/jasa tahun 2016 belum efektif untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Artikel Terkait

- [PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016](#)
- [Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011](#)
- [PENYERAHAN LHP ATAS LK TA 2016 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN INDRAGIRI](#)

[HILIR, KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN SIAK DAN KOTA PEKANBARU](#)

- [Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Pemerintah Provinsi Riau TA 2014](#)
- [Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2011](#)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Riau

Jalan Jendral Sudirman No. 721, Pekanbaru - Riau

Telp.(0761) 856464, Fax.(0761) 858787

Email: bpk_pnb@bpk.go.id

Hak Cipta 2009 © BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

[Hubungi Kami](#) | [Peta Situs](#) | [Syarat dan Ketentuan](#)

Untuk mendapatkan tampilan terbaik situs ini gunakan resolusi 1024x768 dan browser IE versi 7+ atau Firefox versi 3+.